



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
TAHUN 2020-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Pasal 10 terkait penyusunan Rencana Aksi Daerah PUG Kabupaten/ Kota yang tertuang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah, maka perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Yogyakarta Tahun 2020-2023;
- b. bahwa Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam huruf a sebagai upaya strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai kondisi dan karakter daerah dan bersifat implementatif dan terukur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Tahun 2020-2023 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 11);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 5);
6. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020-2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
2. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
3. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat RAD PUG adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman

- dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral.
4. Responsif Gender adalah aspek yang memperhatikan kondisi kesenjangan antara perempuan dan laki - laki terhadap akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan serta mengangkat isu ketinggalan dari salah satu jenis kelamin.
 5. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 7. Walikota adalah Walikota Yogyakarta
 8. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud disusunnya RAD PUG sebagai upaya melaksanakan strategi pembangunan PUG dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dengan visi dan misi pembangunan Daerah agar selaras dan sinkron sesuai kondisi dan karakter daerah dan bersifat implementatif dan terukur.

Pasal 3

Tujuan penyusunan RAD PUG sebagai berikut :

- a. sebagai panduan, arahan bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan yang responsif gender;
- b. mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, serta berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender ; dan
- c. memperkuat sistem dan komitmen Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam mengimplementasikan strategi PUG.

BAB II PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pasal 4

- (1) RAD PUG disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, visi-misi, rencana strategis, kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang terintegrasi di masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- (2) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Mei 2020
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 38

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 38 TAHUN 2020
 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
 PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2020-2023

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 – 2023

Bidang Kelembagaan PUG

No	Isu Strategis	Program/Kegiatan	Indikator	Rumus Capain Program	Kondisi Awal 2019	Target				Rekomendasi	Pelaksana
						2020	2021	2022	2023		
1	Komitmen Politik dalam menjamin/memastikan dokumen perencanaan RPJMD, Renstra, RKPD, Renja sudah responsive gender	1. Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah	Rata-rata capaian target sasaran dan program perangkat daerah	93,48%	92,00%	-	-	-	Penambahan dokumen GAB dan GBS dalam SE penyusunan Renja OPD Pelibatan DPMPPA dalam tim pendampingan penyusunan Renja OPD di masing masing sektor	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan	Rata-rata capaian target sasaran dan program perangkat daerah Jumlah evaluasi dokumen perencanaan yang tepat dibagi jumlah keseluruhan dokumen evaluasi yang harus disusun	-	-	92,20%	92,40%	92,40%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

		2. Kegiatan Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Perempuan melalui Peningkatan Kapasitas dan Penguatan kelembagaan GSI, FPKK, PTPPO, PUSPA	Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas dan Penguatan kelembagaan GSI, FPKK, PTPPO, PUSPA	Frekuensi Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	Pendataan jumlah perempuan dalam Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang mengikuti peningkatan kapasitas	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
		3. Kegiatan Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Perempuan melalui Pelatihan Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Frekuensi Peningkatan kapasitas Penanganan Korban Kekerasan	Frekuensi Kegiatan	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	Pendataan Jumlah Laki – laki dan perempuan yang mengikuti pelatihan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		4. Kegiatan Operasional P2TP2A melalui Penanganan Korban Kekerasan perempuan dan anak Berbasis Gender	Tertanganinya Korban Kekerasan Berbasis Gender	Jumlah kasus yang tertangani	50 Kasus	50 Kasus	50 Kasus	50 Kasus	50 Kasus	Pendataan terpilah terkait jumlah kasus anak, perempuan dan laki – laki Jumlah dewasa laki – laki dan perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

		5. Kegiatan Operasional P2TP2A melalui Peningkatan Kapasitas tentang Perundangan Kekerasan pada Lokus	Frekuensi Peningkatan Kapasitas terkait Perundangan Kekerasan	Frekuensi kegiatan	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	Pendataan jumlah laki – laki dan perempuan terkait kegiatan peningkatan kapasitas terkait perundangan kekerasan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		6. Kegiatan Operasional P2TP2A melalui Penguatan Satgas Siap Grak Anti Kekerasan	Frekuensi Peningkatan Satgas Siap Grak Anti Kekerasan	Frekuensi jumlah orang yang mengikuti kegiatan	105 orang	105 orang	105 orang	105 orang	105 orang	Pendataan jumlah laki – laki dan perempuan yang masuk dalam tim sigrak yang mengikuti kegiatan peningkatan satgas siap grak anti kekerasan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		7. Kegiatan Operasional P2TP2A melalui Penanganan Korban Kekerasan perempuan dan anak Berbasis Gender	Frekuensi Korban Kekerasan perempuan dan anak Berbasis Gender yang direhabilitasi	Frekuensi jumlah rehabilitasi	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Data terkait korban kekerasan baik laki – laki dan perempuan yang direhabilitasi	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

5	Kebijakan baik Perda, Peraturan Walikota , keputusan Walikota yang Responsif Gender	1. Kegiatan Pembinaan Pengarusutamaan Gender melalui pemetaan kebijakan yang Responsif Gender	Meningkatnya Kebijakan kebijakan yang Responsif Gender	Kumpulan dan rekapan kebijakan-kebijakan operasional atau teknis yang responsive gender ,serta dokumen PPRG	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Merupakan bagian dari Komitmen pelaksanaan PUG	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6	Sumber Daya Manusia Pelaksanaaan PUG, dan Sarana Prasarana yang responsive gender	1. Kegiatan Pembinaan Pengarusutamaan Gender melalui Pengembangan kapasitas OPD driver PUG dan FGD PUG	1. Frekuensi Peningkatan kapasitas gender	Frekuensi Peningkatan kapasitas gender	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	salah satu perwujudan indikator pelaksanaan PUG yaitu peningkatan sumber daya manusia	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2. Kegiatan Pembinaan Pengarusutamaan Gender melalui Jumlah Kelompok Sadar Gender	2. Terbentuknya Kelompok Sadar Gender	Jumlah Kelompok Sadar Gender yang dibentuk	6 Kelompok	3 Kelompok	3 Kelompok	3 Kelompok	3 Kelompok	Sebagai perwujudan Forum PUG dimasyarakat yang peka terhadap isu gender serta partisipasi dalam murenbang	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

		3. Kegiatan Pembinaan Pengarusutamaan Gender melalui Gender Champion	3. Terbentuknya duta kesetaraan Gender	Jumlah duta kesetaraan Gender yang dapat penghargaan	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	Penghargaan / apresiasi kepada pribadi, LSM, OPD ,yang peduli dengan kemajuan dan perkembangan PUG sebagai pendorong pencapain kesetaraan gender di daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6	Sumber Daya Manusia Pelaksanaan PUG, dan Sarana Prasarana yang responsive gender	Program Pembangunan Gedung Pemerintah	Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan	Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah yang sudah dibangun/direhab / Jumlah Gedung yang dimiliki Pemerintah x 100%	88 %					Data bangunan dengan fasilitas akses ramah disabilitas : 1. Pemerintahan : 22 2. Kecamatan : 14 3. Kelurahan : 45 4. Pendidikan : •TK : 3 •SD : 90 •SMP : 16 5. Kesehatan : 27 6. Perekonomian : 30	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

		2. Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan	Panjang jalan kondisi mantap / panjang jalan kota x 100 %	86%					Panjang Total Trotoar Berdifable : 29098,04 m	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
		3. Program Penataan Bangunan Gedung	3. Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai dengan standar kebutuhan	Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah yang sudah dibangun/direhab / Jumlah Gedung yang dimiliki Pemerintah x 100%		89 %	90 %	91 %	92 %	Data bangunan dengan fasilitas akses ramah disabilitas : 1. Pemerintahan : 22 2. Kecamatan : 14 3. Kelurahan : 45 4. Pendidikan : •TK : 3 •SD : 90 •SMP : 16 5. Kesehatan : 27 6. Perekonomian : 30	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

		4. Program Penyelenggaraan Jalan	4. Prosentase kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan bangunan pelengkap dalam kondisi baik	Panjang jalan kondisi mantap / panjang jalan kota x 100 %		88%	90%	92%	94%	Panjang Total Trotoar Berdifable : 29098,04 m	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
7	Penyusunan data pilah gender melalui pembedaan yang diintegrasikan dalam sistem data tiap OPD	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan melalui Forum Data Gender Dan Anak	Persentase Forum Data Gender Dan Anak yang aktif	Jumlah data yang dikumpulkan dibagi jumlah Forum Data Gender X 100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Data Pilah Gender digunakan untuk penyusunan perencanaan, kebijakan dan program	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8	Peran serta dan kerjasama masyarakat, LSM, Ormas, Perguruan Tinggi dalam program kegiatan PUG	1. Kegiatan Pembinaan Pengarusutamaan Gender melalui Penyusunan Kajian terkait PUG dengan Perguruan Tinggi	Tersedianya Kajian terkait PUG	Jumlah Kajian terkait PUG	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Sebagai perwujudan jejaring dan kemitraan dengan Perguruan tinggi terkait kajian dalam meningkatkan PUG dan PPRG	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

		2. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan melalui Pendampingan Organisasi Perempuan	Frekuensi Pendampingan Organisasi Perempuan	Frekuensi Pendampingan Organisasi Perempuan	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali	Sebagai perwujudan peran serta masyarakat/ Lembaga masyarakat dalam kegiatan PUG di daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
--	--	--	---	---	---------	---------	---------	---------	---------	--	---

Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan

No.	Issu Strategis	Program/ Kegiatan	Indikator	Rumus Capain Program	Kondisi Awal 2019	Target Capaian Program/Kegiatan				Rekomendasi	Pelaksana
						2020	2021	2022	2023		
1	Pembinaan Usaha Perdagangan Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah	1. Pameran dan gelar potensi yang melibatkan kelompok perempuan	Jumlah kelompok perempuan	Jumlah rata rata kelompok perempuan pelaku usaha mikro kecil dibagi jumlah kegiatan pameran ,promosi , gelar potensi x 100%	20 %	25 %	30 %	50 %	50 %	Pemilahan dan pelibatan kelompok perempuan dalam mengikuti gelar potensi	Dinas Perdagangan
		2. Toko modern yang bermitra dengan UKM perempuan	Jumlah UKM perempuan	Jumlah rata rata kelompok perempuan pelaku usaha mikro kecil dibagi jumlah toko modern atau toko swalayanx 100%.	20 %	25 %	30 %	50 %	50 %	Pemilahan dan pelibatan UKM perempuan yang bermitra dengan perempuan	Dinas Perdagangan

		3. Pelatihan Usaha Perdagangan untuk Perempuan	Jumlah Peserta perempuan	Jumlah rata rata peserta perempuan dibagi jumlah kegiatan pelatihan usaha perdagangan perempuan x 100%	20 %	25 %	30 %	50 %	50 %	Pemilahan dan pelibatan Peserta perempuan yang melakukan Pelatihan Usaha Perdagangan	Dinas Perdagangan
		4. Kemitraan pedagang perempuan dengan toko modern / distributor	Jumlah pedagang perempuan	Jumlah rata rata pedagang perempuan dibagi jumlah toko modern atau toko swalayan x 100%	20 %	25 %	30 %	50 %	50 %	Pemilahan dan pelibatan pedagang perempuan yang bermitra dengan toko modern / distributor	Dinas Perdagangan
2	Pengawasan dan pengendalian Perdagangan dan Industri	Penyusunan dan Pemberdayaan PKL Perempuan	Jumlah PKL perempuan	Jumlah rata rata PKL perempuan dibagi jumlah kegiatan penyusunan dan pemberdayaan PKL perempuan di kecamatan X 100%	20 %	25 %	30 %	50 %	50 %	Pemilahan dan pelibatan PKL perempuan dalam kegiatan Penyusunan dan Pemberdayaan PKL	Dinas Perdagangan

3	Pembinaan Teknis Perindustrian	Pelatihan teknis Industri bagi IKM Perempuan	Jumlah IKM perempuan	Jumlah IKM Perempuan yang mengikuti pelatihan teknis industri dibagi IKM Laki laki dan Perempuan yang mengikuti pelatihan teknis industry dikali 100 %	20 %	25 %	30 %	50 %	50 %	Pemilahan dan pelibatan IKM perempuan dalam kegiatan Pelatihan teknis Industri	Dinas Perindustrian Koperasi UKM
		Ekspo produk sentra, produk unggulan daerah dan OVOP yang melibatkan kelompok perempuan	Jumlah kelompok perempuan	Jumlah IKM Perempuan yang mengikuti expo dibagi jumlah kelompok IKM Laki laki dan Perempuan yang mengikuti expo kali 100%	20 %	25 %	30 %	50 %	50 %	Pemilahan dan pelibatan kelompok perempuan dalam kegiatan Ekspo produk sentra, produk unggulan daerah dan OVOP	Dinas Perindustrian Koperasi UKM
		Pendataan Industri Mikro Kecil berdasar Jenis Kelamin	Jumlah industri	Memasukkan kolom jenis kelamin pada form pendataan IKM	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Pemilahan dan pelibatan industry Pendataan Industri Mikro Kecil	Dinas Perindustrian Koperasi UKM

4	Pembinaan Sarana Industri	1. Pelatihan sarana Produksi bagi IKM perempuan	Jumlah IKM Perempuan	Jumlah IKM Perempuan yang mengikuti pelatihan dibagi jumlah IKM Laki laki dan Perempuan yang mengikuti pelatihan dikali 100%	20 %	25 %	30 %	50 %	50 %	Pemilahan dan pelibatan IKM Perempuan dalam kegiatan Pelatihan sarana Produksi	Dinas Perindustrian Koperasi UKM
		2. Pameran industry kreatif yang melibatkan kelompok perempuan	1. Jumlah kelompok perempuan	Jumlah kelompok IKM perempuan yang mengikuti pameran dibagi jumlah kelompok IKM Laki laki dan Perempuan yang mengikuti pameran dikali 100%	20 %	25 %	30 %	50 %	50 %	Pemilahan dan pelibatan kelompok perempuan dalam kegiatan Pameran industry kreatif	Dinas Perindustrian Koperasi UKM

		3. Perancangan Teknologi Tepat Guna bagi IKM perempuan	Jumlah IKM Perempuan	Jumlah IKM Perempuan yang dilibatkan kegiatan Teknologi Tepat Guna dibagi jumlah kelompok IKM Laki laki dan Perempuan yang dilibatkan kegiatan Teknologi Tepat Guna dikali 100%	20 %	25 %	30 %	50 %	50 %	Pemilahan dan pelibatan IKM Perempuan dalam kegiatan Teknologi Tepat Guna	Dinas Perindustrian Koperasi UKM
5	Ekonomi masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan	Program Peningkatan ekonomi masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan	Jumlah Perempuan yang terlibat dalam kelompok	jumlah anggota perempuan dibagi total anggota kelompok dikali 100%	20 %	25 %	30 %	35 %	40 %	Pemilahan dan pelibatan Perempuan dan Kelompok perempuan dalam kegiatan Peningkatan ekonomi masyarakat	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah UKM Perempuan terlibat	Jumlah UKM yang terfasilitasi dikurasi jumlah UKM laki laki yang terfasilitasi dibagi total UKM yang terfasilitasi dikali 100%	20 %	25 %	30 %	35 %	40 %	Pemilahan dan pelibatan UKM Perempuan dalam Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
6	Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Jumlah Tenaga kerja perempuan	Jumlah rata rata Tenaga kerja perempuan diperusahaan dibagi Jumlah rata rata Tenaga kerja di perusahaan dikali 100%	20 %	25 %	30 %	50 %	50 %	Pemilahan dan pelibatan Tenaga kerja perempuan dalam program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

		Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Sasaran tenaga kerja perempuan	Sasaran tenaga kerja perempuan yang mengikuti kegiatan penempatan dan perluasan kesempatan kerja dibagi total pekerja laki laki dan perempuan yang mengikuti kegiatan penempatan dan perluasan kesempatan kerja	20 %	25 %	30 %	50 %	50 %	Pemilahan dan pelibatan tenaga kerja perempuan dalam Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
--	--	---	--------------------------------	---	------	------	------	------	------	--	--

Bidang Kesehatan

No	Isu Strategis	Program/Kegiatan	Indikator	Rumus Capaian Program	Kondisi Awal 2019	Target				Rekomendasi	Pelaksana
						2020	2021	2022	2023		
1	Mengendalikan angka kelahiran melalui edukasi dini pengendalian penduduk, peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kualitas keluarga	Program Pelayanan KB dan Pembangunan keluarga (layanan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/unmet need)	Jumlah terlayani	Pus dikurangi (Peserta KB aktif + hamil + ingin anak segera) dibagi jumlah pus kali 100%	11,28%	11,22%	11,16%	11,10%	11,10%	Peningkatan peran pria dalam ber KB	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1. Sub Kegiatan Pembinaan kelompok KB Pria	1. Jumlah kelompok	1. Jumlah kelompok KB pria yang aktif dibagi jumlah seluruh kelompok KB pria kali 100%	70 %	80 %	80 %	90 %	90 %	Pendataan jumlah peserta laki laki dan perempuan	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2. Sub Kegiatan Sosialisasi kesehatan reproduksi	2. Jumlah Peserta	2. Jumlah PIK R yang aktif dibagi jumlah seluruh kelompok PIK R kali 100%	70%	70%	70%	70%	70%	Pendataan jumlah peserta laki laki dan perempuan	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		3. Kegiatan Pembinaan Pembangunan Keluarga	3. Jumlah Kelompok Bina Keluarga Sejahtera BKB, BKR, BKL, UPPKS)	3. Jumlah kelompok BKS dibagi Jumlah RW x 100%	29,70%	31,12, %	32,54%	33,96 %	33,96 %	Pendataan Jumlah peserta laki laki dan perempuan dalam kelompok BKS	Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana

2	Jumlah Kasus, Kematian ibu, Kematian bayi, balita dan permasalahannya	Program Kesehatan Keluarga dan gizi masyarakat	1. Jumlah kasus absolut (jumlah kasus kematian bayi/ 1000 kelahiran hidup 2. Jumlah kasus absolut (jumlah kasus kematian balita/ 1000 kelahiran hidup	Jumlah kasus	Jumlah kasus yang sebenarnya (absolut)	Jumlah kasus yang sebenarnya (absolut)	Jumlah kasus yang sebenarnya (absolut)	Jumlah kasus yang sebenarnya (absolut)	Jumlah kasus yang sebenarnya (absolut)	Jumlah kasus kematian ibu, kematian bayi, balita dan permasalahan bisa terdata , tertangani	Dinas Kesehatan
		1. Kegiatan Pelayanan yang memenuhi standar pada seluruh ibu hamil, Bayi Baru Lahir (BBL) dan balita	1. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	1. Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar dibagi jumlah sasaran ibu hamil kurun waktu yang sama X 100% jumlah balita usia 12-59 bl X 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pendataan jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	Dinas Kesehatan

			2. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan Persalinan sesuai standar	2. Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan divas yankes sesuai standar dalam 1 tahun dibagi jumlah sasaran ibu bersalin kurun waktu yang sama kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pendataan jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan Persalinan sesuai standar	Dinas Kesehatan
			3. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar	3. Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan yankes bbl sesuai standar dalam kurun 1 tahun dibagi jumlah sasaran bbl dalam kurun waktu 1 tahun yang sama kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pendataan jumlah bayi baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar	Dinas Kesehatan

			4. Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4. Jumlah balita usia 12-23 bulan yang pelayanan kesehatan sesuai standar + balita usia 24-35 bulan yang pelayanan kesehatan sesuai standar + balita usia 36-59 bulan yang pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	Pendataan jumlah balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan
3	Pelayanan Kegawatdaruratan maternal neonatal	Program pelayanan kegawatdaruratan ibu hamil, ibu bersalin dan nifas	Terselenggarakan kegawatdaruratan ibu hamil, ibu bersalin, nifas, dan neonatal	Ibu = 20% dari jumlah sasaran ibu hamil dibagi sasaran ibu hamil (dalam 1 tahun) kali 100% neonatal = 15% dari bayi baru lahir dibagi jumlah sasaran bayi baru lahir dalam kurun waktu 1 tahun)	100%	100%	100%	100%	100%	Pendataan jumlah ibu hamil/melahirkan dalam mendapatkan pelayanan kegawatdaruratan	Dinas Kesehatan

		Program memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat terutama ibu anak	1. Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar	1. Jumlah bayi baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	Pendataan jumlah bayi balita laki laki dan perempuan yg baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar	Dinas kesehatan
			2. Balita mendapatkan pelayanan sesuai standar	Jumlah Balita mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	Pendataan jumlah balita laki laki dan perempuan mendapatkan pelayanan sesuai standar	Dinas kesehatan
			3. Ibu hamil mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	Jumlah Ibu hamil mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	Pendataan jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	Dinas kesehatan
		a. Program Suami Siaga	Keterlibatan laki-laki	Jumlah laki-laki yang mengikuti kegiatan Suami Siaga	100%	100%	100%	100%	100%	Pendataan jumlah laki-laki dalam Program Suami Siaga	Dinas Kesehatan

4	Kesehatan ibu, bayi, balita, anak usia sekolah, remaja dan lansia (pendekatan life cycle)	Upaya pembinaan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat	1. Presentas e anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	1. Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran di bagi jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama.	100%	100%	100%	100%	100%	Pendataan anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan
---	---	--	--	---	------	------	------	------	------	---	-----------------

			2. Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2. jumlah balita usia 12-23 bulan yang pelayanan kesehatan sesuai standar + balita usia 24-35 bulan yang pelayanan kesehatan sesuai standar + balita usia 36-59 bulan yang pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	Pendataan jumlah balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan
--	--	--	---	---	------	------	------	------	------	--	-----------------

			3. Persentase Warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100 %	100%	100%	100%	100%	100%	Pendataan Warga Negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar	
--	--	--	---	--	------	------	------	------	------	--	--

5	Promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Program pengendalian penyakit tidak menular	Orang beresiko terinfeksi HIV AIDS (ibu hamil, pasien TB, waria, transgender, pengguna napza warga binaan LP) mendapatkan pemeriksaan HIV/AIDS	Orang beresiko HIV yg diperiksa dibagi dengan orang yang beresiko HIV kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pendataan Jumlah ibu hamil, pasien TB, waria, transgender, pengguna napza warga binaan LP mendapatkan pemeriksaan HIV/AIDS	Dinas Kesehatan
6	Pencegahan, pengendalian penyakit	Program pencegahan, pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa	1. Jumlah Remaja	1. Remaja beresiko HIV yg diperiksa dibagi dengan orang yang beresiko HIV kali 100%	80%	80%	80%	80%	80%	Pendataan Jumlah remaja mendapatkan pemeriksaan HIV/AIDS	Dinas Kesehatan
			2. WUS yang diperiksa untuk deteksi kanker dini kanker leher Rahim dengan metode IV 1	2. Wus (usia 30 th s.d 50 th) dibagi 5 th (sasaran IVA)	80%	80%	80%	80%	80%	Pendataan Jumlah Wanita Usia Subur yang diperiksa untuk deteksi kanker dini kanker leher rahim	Dinas Kesehatan

7	Pencegahan NAPZA	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Sosial, Ekonomi, dan Budaya	Penguatan volunteer supervisi kegiatan anti NAPZA	3. Jumlah pesertadibagi jumlah sasaran anti NAPZA	50%	50 %	50 %	50 %	50 %	Peningkatan kegiatan yang melibatkan pelajar dalam rangka kampanye anti NAPZA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
---	------------------	--	---	---	-----	------	------	------	------	---	-----------------------------------

Bidang Pendidikan

No.	Isu Strategis	Program/ Kegiatan	Indikator	Rumus Capain Program	Kondisi Awal 2019	Target Capaian Program/Kegiatan				Rekomendasi	Pelaksana
						2020	2021	2022	2023		
1	Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar	1. Kegiatan Pengelola Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Guru SD Tersertifikasi PPG	$\frac{\sum \text{Guru SD Tersertifikasi PPG}}{\sum \text{Guru SD}}$	61.23 %	62%	62.3%	62.8%	63.2%	Pelibatan jumlah Guru SD Tersertifikasi PPG responsif gender pada Program Peningkatan Kualitas Tenaga Pengajar SD	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			Jumlah Guru yang dilatih untuk menyusun soal ujian	$\frac{\sum \text{Guru Sd yg dilatih menyusun soal}}{\sum \text{Jumlah Guru SD}}$	30%	30.2%	30.5%	30.7%	40%	pelibatan jumlah Guru yang dilatih untuk menyusun soal ujian responsif gender pada Program Peningkatan Kualitas Tenaga Pengajar SD	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

		2. Kegiatan Pengelola Pendidikan Sekolah Dasar	1. Jumlah Anak Perempuan kurang mampu yang memperoleh bantuan dana pendidikan	$\frac{\sum \text{anak perempuan penerima KMS}}{\sum \text{anak penerima KMS}}$	47.5%	48%	49.5%	50%	50.5%	Pemilahan dan pelibatan Anak Perempuan kurang mampu yang memperoleh bantuan dana pendidikan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			Jumlah Kegiatan edukasi orang tua untuk menyekolahkan anaknya	$\frac{\sum \text{Lokasi sosialisasi PPDB dan JPD}}{\sum \text{Kelurahan}}$	100%	70.25 %	100%	100%	100%	Jumlah Kegiatan edukasi orang tua untuk menyekolahkan anaknya	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan seluruh Kemantren
		3. Kegiatan Pengelola Pendidikan Sekolah Dasar	1. Jumlah siswa perempuan ikut Kejuaraan dalam Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) Sekolah Dasar (SD)	$\frac{\sum \text{siswa perempuan SD mengikuti FLSN}}{\sum \text{siswa SD mengikuti FLSN}}$	30%	31%	31.5 %	32%	32.5%	Pemilahan dan pelibatan siswa perempuan ikut Kejuaraan dalam Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) Sekolah Dasar (SD)	Dinas Pendidikan

			2. Jumlah siswa perempuan ikut Kejuaraan dalam Lomba Dokter Kecil	$\frac{\sum \text{siswa perempuan SD mengikuti dokter kecil}}{\sum \text{siswa mengikuti Dokter kecil}}$	70%	70.25%	70.35%	70.5%	70,57%	Pemilahan dan pelibatan siswa perempuan ikut Kejuaraan dalam Lomba Dokter Kecil	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			3. Jumlah siswa perempuan ikut Kejuaraan dalam Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) SD	$\frac{\sum \text{siswa perempuan SD mengikuti MTQ}}{\sum \text{siswa mengikuti MTQ}}$	48.09%	48.25%	48.50%	49%	49.25%	Pemilahan dan pelibatan siswa perempuan ikut Kejuaraan dalam Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) SD	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
2	Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1. Kegiatan Pengelola Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1. Jumlah Guru SD Tersertifikasi PPG	$\frac{\sum \text{guru SMP tersertifikat PPG}}{\sum \text{guru SMP}}$	59.29%	59.50%	59.75%	59.90%	60%	pelibatan Guru SD Tersertifikasi PPG	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			2. Jumlah Guru yang dilatih untuk menyusun soal ujian	$\frac{\sum \text{Guru SMP yang dilatih menyusun soal}}{\sum \text{Guru SMP}}$	6.68%	6.75%	6.86%	6.94%	7%	Pelibatan Guru yang dilatih untuk menyusun soal ujian	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

		2. Kegiatan Pengelola Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1. Jumlah Anak perempuan kurang mampu yang menyenjam pendidikan Sekolah Menengah	$\frac{\sum \text{siswa perempuan KMS bersekolah}}{\sum \text{siswa perempuan penerima KMS}}$	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah Anak perempuan kurang mampu yang menyenjam pendidikan Sekolah Menengah	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			2. Jumlah Anak perempuan kurang mampu yang memperoleh bantuan dana pendidikan	$\frac{\sum \text{siswa perempuan penerima KMS}}{\sum \text{siswa penerima KMS}}$	50.99%	60.25%	60.30%	60.50%	60.75%	Jumlah Anak perempuan kurang mampu yang memperoleh bantuan dana pendidikan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			3. Jumlah Kegiatan edukasi orang tua untuk menyekolahkan anak perempuan hingga jenjang Sekolah Menengah Atas	$\frac{\sum \text{Lokasi sosialisasi PPDB dan JPD}}{\sum \text{Kelurahan}}$	100%	95.55%	100%	100%	100%	Jumlah Kegiatan edukasi orang tua untuk menyekolahkan anak perempuan hingga jenjang Sekolah Menengah Atas	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

		3. Kegiatan Pengelola Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1. Jumlah siswa perempuan ikut Kejuaraan dalam Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) Sekolah Menengah	$\frac{\sum \text{siswa perempuan SMP mengikuti FLSN}}{\sum \text{siswa SMP mengikuti FLSN}}$	67.44 %	67.75 %	67.88%	67.91%	68%	Pemilahan dan pelibatan siswa perempuan ikut Kejuaraan dalam Festival Lomba Seni Siswa Nasional	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			2. Jumlah siswa perempuan ikut Kejuaraan dalam Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) Sekolah Menengah	$\frac{\sum \text{siswa perempuan SMP mengikuti O2SN}}{\sum \text{siswa SMP mengikuti O2SN}}$	34.6%	35%	35.4%	35.75%	36%	Pemilahan dan pelibatan siswa perempuan ikut Kejuaraan dalam Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) Sekolah Menengah	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

			3. Jumlah siswa perempuan ikut peserta Pengembangan Minat Bakat Siswa	$\frac{\sum \text{siswa perempuan SMP mengikuti Minat bakat}}{\sum \text{siswa SMP mengikuti Minat Bakat}}$	72.70 %	73%	73.10%	73.15%	73.30 %	Pemilahan dan pelibatan siswa perempuan ikut peserta Pengembangan Minat Bakat Siswa	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
3	Pendidikan Formal yang Berperspektif Gender di Semua Jenjang	1. Kegiatan Pengelola Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Pendidikan Inklusi (SPPI)	$\frac{\sum \text{Sekolah Pendidikan Inklusi}}{\sum \text{Sekolah}}$	15.38 %	16.26 %	17.36%	18.46%	19.56 %	Jumlah Sekolah yang menerapkan kurikulum pendidikan Inklusif	Dinas Pendidikan, dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		2. Kegiatan Pengelola Pendidikan Sekolah Dasar	1. Jumlah Workshop pembelajaran	\sum pelaksanaan Workshop Pembelajaran	7 kali	8 kali	9 kali	11 kali	12 kali	Jumlah Workshop pembelajaran bagi guru	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			2. Jumlah Guru yang menjadi peserta workshop pembelajaran	$\frac{\sum \text{peserta workshop pembelajaran}}{\sum \text{jumlah guru}}$	9.35%	10%	11%	12%	13%	Jumlah Guru yang menjadi peserta workshop pembelajaran	Dinas Pendidikan, dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

		3. Kegiatan Pengelola Pendidikan Sekolah Dasar	1. Jumlah Sekolah Pendidikan Inklusi (SPPI)	$\frac{\sum \text{Sekolah Pendidikan Inklusi}}{\sum \text{Sekolah}}$	15.38 %	16.26 %	17.36%	18.46%	19.56 %	Jumlah Sekolah Berperspektif Inklusif	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			2. Jumlah Sekolah Pendidikan Inklusi (SPPI) yang memiliki sarana dan prasarana Inklusi	$\frac{\sum \text{Sekolah yang memiliki sarpras Inklusi}}{\sum \text{Sekolah penyelenggara pendidikan inklusi}}$	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah Sekolah yang memiliki sarana dan prasarana edukasi berperspektif Inklusif	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
4	Peningkatan SDM dan Saprasi Pendukung Pendidikan Non-Formal Masyarakat	Kegiatan Pengelola Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1. Jumlah PKBM terakreditasi	$\frac{\sum \text{PKBM terakreditasi}}{\sum \text{PKBM}}$	56.52 %	56.90 %	57.22%	57.95%	58.32 %	Jumlah Kelengkapan sarpras sesuai standar pada seluruh lembaga pendidikan non-formal masyarakat	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga,
			2. Jumlah Pendidik berkualifikasi S1/D4	$\frac{\sum \text{Pendidik berkualifikasi S1/D4 PKBM}}{\sum \text{Pendidik PKBM}}$	85.36 %	85.47 %	85.65%	85.95%	86.20 %	Jumlah Pendidik pendidikan non-formal masyarakat berkualitas	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga,

Bidang Politik, Hukum dan HAM

No	Issu Strategis	Program/ Kegiatan	Indikator	Rumus Capain Program	Kondisi Awal 2019	Target Capaian Program/Kegiatan				Rekomendasi	Pelaksana
						2020	2021	2022	2023		
1.	Masyarakat Sadar Hukum	Kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat	Terselenggarakan penyuluhan hukum kepada masyarakat	Frekuensi penyuluhan hukum kepada masyarakat	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	Pemilahan data laki laki dan perempuan dalam penyelenggaraan penyuluhan hukum kepada masyarakat	Bagian Hukum
		Kegiatan sosialisasi produk hukum	Terselenggarakan sosialisasi produk hukum	Frekuensi sosialisasi produk hukum	8 Kali	6 Kali	6 Kali	6 Kali	6 Kali	Pemilahan data laki laki dan perempuan dalam sosialisasi produk hukum	Bagian Hukum
2.	Frekuensi Kaukus Perempuan dalam Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Pengembangan Kerjasama dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat melibatkan Perempuan	Jumlah perempuan dalam penjaringan aspirasi masyarakat	Jumlah pengajuan Penjaringan Aspirasi Masyarakat dibagi 12 bulan kali 100%	70%	40 %	50%	50%	50 %	Pemilahan data dan pelibatan perempuan dalam kegiatan Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Sekretariat DPRD

3.	Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Dalam Pendidikan Politik	1. Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1. Pendidikan Politik Bagi Kelompok Perempuan Se-Kota Yogyakarta	Jumlah sasaran perempuan dibagi jumlah sasaran pendidikan politik	0%	0 %	14 %	17 %	20 %	Peningkatan kegiatan yang melibatkan perempuan dalam rangka pendidikan politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		2. Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	2. Kelas Demokrasi Bagi Siswa Sekolah	Jumlah sasaran anak sekolah dibagi jumlah sasaran pendidikan politik	0%	0 %	20 %	20 %	20 %	Peningkatan kegiatan yang melibatkan pemilih pemula(remaja) dalam rangka pendidikan politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		3. Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	3. Pendidikan Politik Bagi Kelompok Marginal dan Disabilitas Se-Kota Yogyakarta	Jumlah sasaran anak kelompok marginal dan disabilitas dibagi jumlah sasaran pendidikan politik	0%	0 %	14 %	17 %	20 %	Peningkatan kegiatan yang melibatkan kelompok marginal dan disabilitas dalam rangka pendidikan politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

		4. Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	4. Pendidikan Politik Bagi Kelompok Perempuan Se-Kota Yogyakarta	Jumlah sasaran perempuan dibagi jumlah sasaran pendidikan politik	0%	0 %	14 %	17 %	20 %	Peningkatan kegiatan yang melibatkan perempuan dalam rangka pendidikan politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4.	Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif	1. Pemberlakuan kuota 30 % perempuan dalam pencalonan anggota legislatif	1. Keanggotaan partai politik minimal memenuhi kuota 30 % anggota	Kuota 30 % perempuan dalam daftar calon tetap (DCT)	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	Komitmen partai politik dalam melaksanakan kebijakan afirmatif bagi perempuan	KPU dan Bawaslu
		2. Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan, dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	2. Prosentasi partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu dan pemilihan	pemilih perempuan dibagi Pemilih secara umum x 100%	77,5%	77,5 %	77,5%	77,5%	77,5%	1. Pendidikan politik bagi perempuan untuk diprogramkan dan dikembangkan 2. Kursus/ pelatihan politik bagi perempuan	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan, dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat

5.	Pemimpin Perempuan di Eksekutif	Penataan JPT Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas	Jumlah JPT Pratama, Jab. Administrator dan Pengawas Perempuan	Jumlah JPT Pratama, Jab. Administrator dan Pengawas Perempuan dibagi Jumlah JPT Pratama, Jab. Administrator dan Pengawas x 100%	49%	50%	51%	51,5%	52%	Pendataan JPT Pratama, Jab. Administrator dan Pengawas Perempuan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,
		Pengiriman Pelatihan Kepemimpinan	Jumlah pejabat struktural perempuan yang telah mengikuti pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat struktural perempuan yang telah mengikuti pelatihan kepemimpinan dibagi Jumlah pejabat struktural perempuan x 100%	90%	90 %	91 %	91,5 %	92%	Penghitungan Jumlah pejabat struktural perempuan yang telah mengikuti pelatihan kepemimpinan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,

6.	Isu gender yang terdokumentasikan di Media	Kegiatan promosi publikasi dan kemitaan informasi (Sosialisasi Berbagai Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta terkait isu gender di media)	Jumlah media untuk pelaksanaan sosialisasi	Jumlah media dibagi target media yang digunakan untuk sosialisasi kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pendataan sosialisasi kebijakan terkait isu gender	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
----	--	---	--	---	------	------	------	------	------	--	---

Bidang Sosial Budaya

No.	Issu Strategis	Program/ Kegiatan	Indikator	Rumus Capain Program	Kondisi Awal 2019	Target Capaian Program/Kegiatan				Rekomendasi	Pelaksana	
						2020	2021	2022	2023			
1.	Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Yogyakarta cukup tinggi	1. kegiatan gelar potensi anak panti	Frekuensi Gelar Potensi Anak Panti	Frekuensi kegiatan	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	Pendataan jumlah Anak Panti dalam kegiatan Gelar Potensi	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2. kegiatan penyaluran bantuan korban bencana	Laporan Hasil Evaluasi Penyaluran Bantuan Korban Bencana	Jumlah laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	Pendataan jumlah Korban Bencana yang menerima bantuan	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		3. kegiatan pembinaan bagi kelompok lanjut usia potensial	Jumlah Kelompok Lanjut Usia Potensial yang mendapat pembinaan	Jumlah Kelompok Lanjut Usia Potensial	8 Kelompok	8 Kelompok	8 Kelompok	8 Kelompok	8 Kelompok	8 Kelompok	Pendataan jumlah usia lanjut potensial dalam Kegiatan pembinaan	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		4. kegiatan gelar potensi dalam rangka hari lanjut usia nasional Kota Yogyakarta	Frekuensi Gelar Potensi dalam rangka Hari Lanjut Usia Nasional Kota Yogyakarta	Frekuensi kegiatan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Pendataan jumlah usia lanjut dalam Kegiatan Gelar Potensi	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

		5. kegiatan peningkatan kapasitas tagana, KSB dan komunitas	Frekuensi Peningkatan Kapasitas Tagana, KSB dan Komunitas	Frekuensi kegiatan	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	Pendataan jumlah laki laki dan perempuan dalam Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tagana, KSB dan Komunitas	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		6. kegiatan seleksi penghuni RPLU dan RPA	Laporan Seleksi Penghuni RPLU dan RPA	Laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1. Data laporan jumlah laki laki dan perempuan lansia terlantar di RPLU 2. Data laporan jumlah anak laki laki terlantar dan anak perempuan terlantar di RPA	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		7. kegiatan fasilitasi penyaluran bantuan social lanjut usia terlantar	Frekuensi fasilitasi penyaluran bantuan sosial lanjut usia terlantar	Frekuensi kegiatan	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	Pendataan jumlah usia lanjut dalam Kegiatan Kegiatan fasilitasi bantuan	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

		8. kegiatan fasilitasi penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT)	Frekuensi fasilitasi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Frekuensi kegiatan	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	Pendataan jumlah laki laki dan perempuan dalam Kegiatan fasilitasi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		9. kegiatan fasilitasi penyaluran bantuan program keluarga harapan (PKH)	Frekuensi fasilitasi penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)	Frekuensi kegiatan	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	Pendataan jumlah PKH dalam Kegiatan fasilitasi penyaluran Bantuan	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		10. Program perlindungan dan jaminan sosial melalui kegiatan pelayanan santunan kematian bagi keluarga yang memiliki KMS	Laporan Pelayanan Santunan Kematian bagi Keluarga yang Memiliki KMS	Laporan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Pendataan jumlah laki laki dan perempuan yang menerima KMS dalam Kegiatan Pelayanan Santunan Kematian	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

		11.kegiatan pelayanan mobil jenazah	Jasa Pelayanan Mobil Jenazah	Frekuensi Jasa Pelayanan Mobil Jenazah	12 bulan	-	-	-	-	Pendataan jumlah jenazah laki laki dan jenazah perempuan yang terlayani mobil jenazah dalam 1 tahun	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		12.kegiatan pendataan jenazah terlantar yang dimakamkan	Laporan Jenazah Terlantar yang Dimakamkan	Laporan	1 laporan	-	-	-	-	data laporan jumlah jenazah terlantar laki laki dan jenazah terlantar perempuan yang dimakamkan	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		13.kegiatan penanganan orang terlantar yang kehabisan bekal dalam perjalanan	Laporan Penanganan Orang Terlantar yang Kehabisan Bekal dalam Perjalanan di Kota Yogyakarta	Laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	data laporan jumlah laki laki dan perempuan yang terlantar yang Kehabisan Bekal dalam Perjalanan di Kota Yogyakarta	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

		14. Kegiatan pelayanan anak di rumah pengasuhan anak wiloso projo	Jasa Pelayanan Anak terlantar yang dilayani	Frekuensi Jasa Pelayanan Anak terlantar	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Pendataan jumlah Anak terlantar laki laki dan perempuan yang terlayani dalam 1 tahun di Wiloso Projo	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		15. Kegiatan pelayanan di rumah pelayanan sosial lanjut usia terlantar budhi dharma	jasa pelayanan lanjut usia yang dilayani	Frekuensi Jasa Pelayanan lanjut usia	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Pendataan jumlah lanjut usia laki laki dan perempuan yang terlayani dalam 1 tahun di budhi dharma	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		16. kegiatan kursus dan mendapatkan bantuan modal usaha bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Penyandang disabilitas dan keluarga penyandang disabilitas yang mengikuti kursus dan mendapatkan bantuan modal usaha	Jumlah Penyandang disabilitas dan jumlah anggota keluarga penyandang disabilitas yang mengikuti kursus	40 orang	55 orang	55 orang	55 orang	55 orang	Pendataan jumlah laki laki dan perempuan Penyandang disabilitas dan anggota keluarga penyandang disabilitas	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

		17.kegiatan pelatihan dan mendapatkan bantuan modal usaha serta pengantaran ke RSJ bagi PMKS	Keluarga penyandang sakit jiwa yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan bantuan modal usaha serta pengantaran ke RSJ	Jumlah penyandang sakit jiwa dan jumlah anggota keluarga penyandang sakit jiwa yang mengikuti pelatihan	85 orang	85 orang	85 orang	85 orang	85 orang	Pendataan jumlah laki laki dan perempuan Penyandang sakit jiwa dan anggota keluarga penyandang sakit jiwa	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		18.kegiatan pelatihan dan bantuan modal usaha bagi PMKS	Klien masyarakat yang mengikuti pelatihan dan bantuan modal usaha	Jumlah Klien masyarakat dan jumlah anggota keluarga Klien masyarakat yang mengikuti pelatihan	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	Pendataan jumlah laki laki dan perempuan Klien masyarakat dan anggota keluarga Klien masyarakat	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

		19.kegiatan pelatihan dan bantuan modal usaha bagi PMKS	Korban tindak kekerasan yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan bantuan modal usaha	Jumlah Korban tindak kekerasan dan jumlah anggota keluarga Korban tindak kekerasan yang mengikuti pelatihan	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	Pendataan jumlah laki laki dan perempuan Korban tindak kekerasan dan anggota keluarga Korban tindak kekerasan	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		20.kegiatan pelatihan dan bantuan modal usaha bagi PMKS	Anak rentan hidup dijalan, gelandangan dan pengemis yang mengikuti pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha	Jumlah Anak rentan hidup dijalan, gelandangan dan pengemis yang mengikuti pelatihan	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	Pendataan jumlah anak laki laki dan anak perempuan rentan hidup dijalan, gelandangan dan pengemis	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		21.kegiatan motivasi bagi PMKS	Laporan anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang mendapatkan motivasi	Laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	data jumlah anak laki laki dan anak perempuan jalanan, gelandangan, dan pengemis	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

		22. Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial melalui kegiatan pelatihan bagi PMKS	Perempuan rawan sosial ekonomi yang mengikuti pelatihan	Jumlah perempuan rawan sosial ekonomi yang mengikuti pelatihan	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	Pendataan jumlah perempuan rawan sosial ekonomi	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		23. Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial melalui kegiatan penguatan sosial psikologis bagi PMKS	ODHA yang mengikuti penguatan sosial psikologis	Jumlah Orang Dengan HIV Aid (ODHA) yang mengikuti penguatan sosial psikologis	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	Pendataan jumlah laki laki dan perempuan Dengan HIV Aid (ODHA)	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		24. Kegiatan Advokasi dan Pendampingan PMKS melalui Pemenuhan Hak-hak Disabilitas	Laporan Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Disabilitas	Laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	data laki laki dan perempuan yang duduk dalam Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Disabilitas	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

		25. Kegiatan Advokasi dan Pendampingan PMKS melalui penyaluran alat bantu bagi penyandang disabilitas	Laporan penyaluran alat bantu bagi penyandang disabilitas	Laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	data jumlah laki laki dan perempuan penyandang disabilitas yang menerima penyaluran alat bantu	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		26. Kegiatan advokasi dan pendampingan PMKS melalui penanganan dan rekomendasi anak terlantar	Laporan penanganan dan rekomendasi anak terlantar	Laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	data jumlah anak laki laki dan anak perempuan terlantar yang tertangani dan mendapatkan rekomendasi	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		27. Kegiatan advokasi dan pendampingan PMKS melalui surat rekomendasi	Laporan advokasi dan surat rekomendasi bagi PMKS	Laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1. data jumlah anak laki laki dan anak perempuan yang tidak mampu mendapatkan surat rekomendasi 2. data jumlah laki laki dan perempuan	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

										yang sakit yang tidak mampu mendapatkan surat rekomendasi	
		28. Kegiatan Advokasi dan Pendampingan PMKS melalui pembinaan KUBE dan USEP	Laporan pembinaan dan pendampingan KUBE dan USEP	Laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	data jumlah laki laki dan perempuan yang masuk KUBE dan USEP	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		29. Kegiatan advokasi dan pendampingan PMKS melalui Peringatan HDI	Frekuensi Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI)	Frekuensi kegiatan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	data jumlah laki laki dan perempuan disabilitas yang menghadiri kegiatan	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		30. Kegiatan Advokasi dan Pendampingan SNPA (Standar Nasional Pengasuhan Anak) bagi LKSA	Laporan Pendampingan SNPA (Standar Nasional Pengasuhan Anak) bagi LKSA	Laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	data jumlah anak laki laki dan anak perempuan yang masuk dalam data LKSA terkait pendampingan sesuai NSPA (Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

										Standart Nasional Pengasuhan Anak)	
2.	Perkawinan Usia anak	1. Kegiatan pelayanan KB dengan Sub Kegiatan yaitu Pelatihan Konseling bagi Pendidik dan Konselor Sebaya	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	Jumlah peserta yang diundang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	Pendataan Jumlah peserta remaja yang mengikuti pelatihan Konseling bagi Pendidik dan Konselor Sebaya	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2. Kegiatan pelayanan KB dengan Sub Kegiatan yaitu pembinaan dan evaluasi PIK R	Jumlah kelompok PIK R yang melaksanakan pembinaan	Jumlah kelompok PIK R yang melaksanakan pembinaan dibagi jumlah kelompok PIK R yang ada x 100%	70%	70%	70%	70%	70%	Jumlah kelompok PIK R remaja yang melaksanakan pembinaan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

		3. Program pembekalan pra nikah	Jumlah peserta perempuan dan laki laki yang mengikuti pembekalan pra nikah	Calon pengantin yang mengikuti pembekalan pra nikah dibagi calon pengantin yang mendaftar x 100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1. Pembinaan berkelanjutan bagi perkawinan usia anak Pendataan perkawinan usia anak (lebih dari atau sama degan 19 tahun dan dibawah 21 tahun)	Kementrian Agama
3.	Partisipasi Perempuan dalam Lingkungan Hidup	1. Program Pengelolaan Persampahan melalui Kegiatan Pengelolaan Sampah	Fasilitas pendaurulangan sampah yang dikelola	Jumlah fasilitas pendaurulangan sampah yang dikelola	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	Pendataan jumlah perempuan yang menerima manfaat prodak daur ulang sampah	Dinas Lingkungan Hidup
		2. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan LH untuk masyarakat melalui Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan	Kelompok masyarakat yang mengelola sampah mandiri (3R)	Jumlah kelompok peserta yang mengikuti Pendidikan , Pelatihan dan Penyuluhan dibagi jumlah RW sekota	= 455 : 615 x 100%=	=481 : 615 x 100%=	508 Kelompok	523 Kelompok	523 Kelompok	Pendataan jumlah perempuan yang mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

		Penyuluhan LH untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
		3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) melalui Kegiatan Pengelolaan Kehati Kabupaten/Kota	RTHP yang terpelihara	Jumlah RTHP yang dimanfaatkan dibagi jumlah total RTHP kali 100%	38	48	48	47	47	Jumlah RTHP yang dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya untuk 5 kelompok rentan/afirmasi gender	Dinas Lingkungan Hidup
4.	Isu dan Permasalahan Gender di Media Sosial	Kegiatan pengelolaan dan pengembangan smart city yang menasar Pelayanan Pengaduan Permasalahan Gender Berbasis Online	Website (Aplikasi)	Jumlah Website (Aplikasi) yang melayani pengaduan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Pendataan jumlah Website (Aplikasi) yang menasar Pelayanan Pengaduan Permasalahan Gender Berbasis Online	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

5.	Partisipasi Perempuan dalam Pelestarian Seni dan Budaya Tradisional	Program Pelestarian Adat, Seni dan Tradisi	Jumlah rintisan kelurahan budaya	Jumlah rintisan kelurahan budaya tahun sebelumnya +1 (n+1)	20	21	21	21	21	Pendataan jumlah perempuan dalam Kelompok Seni dan Budaya Tradisional	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan),
6.	Partisipasi sebagai Kader Lansia	Kampung Pangan Lestari	Jumlah peserta kegiatan	Jumlah peserta keterwakilan gender dibagi jumlah total pesera kali 100%	60 %	70 %	70%	80 %	80 %	Pendataan jumlah keterwakilan gender dalam program Kampung Pangan Lestari	Dinas Pertanian dan Pangan
7	Partisipasi dalam Kegiatan Ketahanan Pangan	Kegiatan Penyuluhan dan pelatihan pemadaman kebakaran	Jumlah peserta Penyuluhan /pelatihan	30 % dari 1 kegiatan perkelurahan	30 %	40 %	50 %	50 %	50 %	Pendataan jumlah Perempuan dalam penyuluhan dan edukasi bahaya kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

8	Pencegahan Kebakaran	1. Kegiatan edukasi Kebakaran	Jumlah Sekolah	jumlah sekolah TK / paut pertahun dibagi total target sekolah yang mengikuti edukasi kali 100%	60 kali	60 kali	60 kali	60 kali	60 kali	Pendataan jumlah sekolah TK / paut	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
---	----------------------	-------------------------------	----------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	------------------------------------	--

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI